

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dimanapun selalu berefek ganda, disatu sisi akan ada kelompok (kecil) masyarakat yang bisa menikmati hasil pembangunan, bahkan kian besar dan besar. Disisi lain akan ada yang tetap tertinggal. Inilah kelompok yang tidak memiliki akses ekonomi memadai, sehingga sulit berkembang, dapat dikatakan sekarang ini hampir seluruh sektor ekonomi dikuasai oleh konglomerat. Dari industri berteknologi tinggi sampai industri sambal, dari perdagangan grosir sampai eceran, dari agroindustri sampai pertanian tradisional, dari penambang emas sampai pasir, semua telah dimasuki mereka (Kliping Harian Republika, 1993).

Terlebih lagi pada saat sekarang ini bangsa Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi yang tidak hanya berakibat bagi konteks pembangunan nasional, lebih-lebih lagi bagi masyarakat kecil, sehingga kesenjangan ekonomi kuat dan besar dengan kelompok ekonomi lemah semakin mencolok.

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat dengan dramatis, tahun 1997 hanya sekitar 21 juta jiwa, pada tahun ini meningkat 4 kali lipat, sekitar 80 juta jiwa. Dalam waktu yang berbarengan muncul persoalan yang demikian kompleks, diantaranya kenaikan harga sembako, rawan pangan, inflasi, tingginya suku bunga bank, banyaknya jumlah tenaga kerja yang ter-PHK, keresahan sosial, persoalan

kesehatan dan pendidikan serta melemahnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah (BMS Info, 1999).

Berbagai program digelar oleh pemerintah untuk menanggulangi akibat krisis moneter ini, kita kenal program PDM DKE, padat karya, pengadaan pangan murah, dukungan layanan kesehatan dan lain sebagainya. Diharapkan berbagai program ini dapat membantu kesulitan masyarakat miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan. Berbagai liputan pers dan pemantauan rekan-rekan LSM dan Perguruan Tinggi, menunjukkan berbagai program yang dirancang pemerintah bagi masyarakat miskin ternyata bermasalah. Paling kurang ada lima masalah utama. *Pertama*, ternyata banyak penerima program tersebut bukanlah masyarakat yang termasuk miskin, seperti kelompok KS I dan pra KS. *Kedua*, dalam penyaluran dan dikorupsi oleh penyelenggara. *Ketiga*, pendekatan yang digunakan melalui pola bagi rejeki menimbulkan ketergantungan masyarakat pada pihak luar. *Keempat*, cukup banyak ditemui di lapangan program yang tumpang tindih, dan *Kelima*, ketidaksiapan pelaksana dengan pola pemberdayaan yang menjadi inti program (BMS Info, 1999 : 18/IV).

Menurut Adi Sasono (1997:6), ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat adalah: *Pertama*, komitmen politik pemerintah hendaknya ditindak lanjuti dengan tindakan politis yang nyata berupa penciptaan aturan yang secara langsung dapat mendukung pengembangan ekonomi rakyat. Hal ini tentu memerlukan dukungan politik yang luas dari berbagai pihak terutama mengenai arti penting agenda pemerataan. Dukungan masyarakat ini

diharapkan menjadi agenda nasional. *Kedua*, mendesak untuk segera dilakukan pengkajian yang serius terhadap usaha-usaha kerakyatan. Dari sini kemudian dikembangkan model-model pengembangan masyarakat dan program aksi pada pusat-pusat ekonomi rakyat yang ada, yang kemudian dapat menjadikan sebagai modal percontohan ditempat lain secara massal. *Ketiga*, pembangunan sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna, sehingga masyarakat luas bisa secara langsung menikmati nilai tambah ekonomi dari usaha yang dilakukannya. Pengembangan ini akan semakin penting khususnya dalam menghadapi era perdagangan bebas dunia yang juga melanda komoditas yang dihasilkan oleh kelompok usaha kecil ini. *Keempat*, perlu dikembangkan fungsi katalis pembangunan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendorong tumbuhnya potensi, kreatifitas dan produktifitas masyarakat di tingkat “Akar rumput”.

Dalam proses pembangunan ekonomi kita, diperlukan upaya peningkatan peran serta secara aktif, tidak hanya dari pelaku ekonomi yang sudah eksis, tetapi justru yang lebih penting dari kalangan generasi muda yang relatif belum terlibat langsung dalam dunia usaha, sehingga nantinya diharapkan akan mampu berkembang dan secara konkrit dan sistematis mampu membantu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi rakyat dalam rangka proses pendemokrasian perekonomian bangsa Indonesia (Zainul Arifin, 2000;94).

Organisasi-organisasi sosial yang dimaksudkan untuk membentuk tingkah laku manusia sesuai dengan pola yang ditentukan, baik pola yang ditetapkan oleh doktrin agama, ajaran etik maupun oleh filsafat politik, pasti menghadapi suatu

dilema. Apabila organisasi-organisasi tersebut ingin berhasil dalam mempengaruhi masyarakat sesuai dengan arah tujuannya masing-masing, maka organisasi-organisasi itu harus berhasil dalam dua sektor. Disatu pihak organisasi tersebut harus menertibkan kebiasaan-kebiasaan para anggotanya sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai. Dilain pihak, apabila organisasi itu juga ingin mempengaruhi masyarakat yang lebih luas, mereka jelas harus mengembangkan organisasi dan memperbesar pengaruhnya yang potensial dengan cara memasukan orang-orang yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan di luar lingkungan mereka (Elizabeth K. Nottingham, 1985:145).

Pada saat ini telah banyak organisasi kemasyarakatan atau lembaga yang menangani kesejahteraan sosial diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tetapi belum semua pengelola/pengurus dapat melakukan peran dan fungsinya secara maksimal, keadaan semacam ini disebabkan berbagai faktor baik yang datang dari dalam organisasi/lembaga itu sendiri maupun faktor lainnya yang mendukung operasional kegiatan lembaga. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan, karena disatu pihak permasalahan yang harus ditangani semakin meningkat sedangkan dipihak lain wadah yang diharapkan dapat membantu menanggulangi permasalahan tersebut masih saja jalan ditempat. Ada banyak beberapa permasalahan kesejahteraan sosial dikalangan masyarakat yang perkembangannya cukup pesat, diantaranya masalah anak terlantar, masalah gelandangan dan pengemis, masalah fakir miskin, masalah anak jalanan dan sebagainya.

Demikian juga halnya di wilayah Cikarang-Bekasi, terutama masalah anak-anak jalanan. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah anak jalanan di Desa Cikarang semakin bertambah. Menurut statistik Dinas Sosial Cabang Kabupaten Bekasi pada awal tahun 1999 tercatat 385 anak jalanan usia sekolah (8-18 tahun) di Kabupaten Bekasi termasuk 69 anak di Desa Cikarang. Namun pada awal Juli 1999 jumlah anak jalanan di Desa Cikarang telah membengkak menjadi 125 anak.

Keadaan ini kemudian menjadi perhatian Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (BMS) yang merupakan bagian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam upaya pengembangan masyarakat dan membantu anggota masyarakat yang terpuruk agar mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Data sementara 125 anak jalanan yang ada memperlihatkan bahwa kegiatan yang mereka lakukan untuk mendapatkan pendapatan antara Rp. 4.000,00 hingga Rp. 10.000,00 perhari adalah hasil usaha jasa semir sepatu, dagang kantong plastik, pengumpul kardus/bahan bekas, dagang rokok dan kuli panggul. Penyemir sepatu dan pedagang kantong plastik merupakan bidang yang paling besar. Masing-masing penyemir sepatu 44 orang dan pedagang kantong plastik 46 orang. Pengumpul kardus dan barang bekas dilakukan oleh 19 orang dan selebihnya sebagai kuli panggul 6 orang. Namun paket program ini memiliki keterbatasan, seperti untuk sementara jangkauan hanya bagi 75 anak jalanan yang usianya 6 – 18 tahun, sekolah atau sudah putus sekolah, tinggal dengan orang tua atau tidak, mempunyai aktivitas di jalanan minimal 4 jam/hari.

Dengan dana bantuan dari Kanwil Sosial Jawa Barat, BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (BMS) melakukan program pendampingan untuk 75 anak jalanan usia sekolah di Desa Cikarang-Bekasi. Bentuk bantuan yang diberikan termasuk pemberian biaya dan kebutuhan sekolah kepada 25 anak yang masih ingin sekolah. Bantuan lainnya adalah 25 remaja jalanan (usia 15-18 tahun) mendapat pelatihan keterampilan sebagai supir, montir atau tukang cukur agar bisa mendapat penghasilan lebih baik. Sementara 25 remaja sisanya mendapat modal bantuan usaha untuk membuka usaha kecil berupa dagang makanan, buah-buahan sayuran dan berjualan rokok.

Realisasi bantuan modal untuk anak jalanan telah mencapai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Agar modal tersebut terus bergulir dan berkembang, Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (BMS) mengelolanya melalui jasa layanan keuangan Syariah yang berbentuk BMT dengan nama BMT Al Inayah. Lembaga keuangan BMT Al Inayah ini terdapat 3 unit, khusus untuk bantuan dana bagi anak-anak jalanan dikelola melalui BMT Al Inayah unit III yang berpusat di Depot Kreatif Ibnu Sabil Cikarang. Pada saat pertama, tabungan anak mencapai Rp. 285.000,00 telah mulai mengembalikan sebesar Rp. 330.000,00. Perkembangan hingga saat ini tercatat hingga 52 anggota dan tabungan sebesar Rp. 1.532.600,00. Pada akhir Maret 2001, BMT Unit III ini telah memberikan layanan penyaluran pinjaman kepada 53 orang dengan jumlah Rp. 25.287.000,00.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengangkat masalah ini menjadi Tulisan Ilmiah guna mengetahui lebih lanjut usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera melalui lembaga keuangannya yang berdasarkan prinsip syari'ah dalam memberikan bantuan kepada anak jalanan. Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul : **“PERANAN BMT AL INAYAH YAYASAN BINA MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM MENANGGULANGI ANAK-ANAK JALANAN DI CIKARANG – BEKASI”**.

B. Perumusan Masalah

1. Apa bentuk kegiatan yang dilakukan BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dalam menanggulangi anak-anak jalanan di Cikarang-Bekasi?
2. Apa hasil-hasil program BMT Al Inayah terhadap penanggulangan anak-anak jalanan serta bagaimana perkembangan anak-anak jalanan selanjutnya?
3. Apa faktor penunjang dan penghambat operasional BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dalam menanggulangi anak-anak jalanan di Cikarang-Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kegiatan yang dilakukan BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dalam menanggulangi anak-anak jalanan di Cikarang-Bekasi.

2. Untuk mengetahui hasil-hasil program BMT Al Inayah terhadap penanggulangan anak-anak jalanan serta perkembangan selanjutnya.
3. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat operasional BMT Al Inayah Yayasan BMS dalam menanggulangi anak-anak jalanan di Cikarang – Bekasi.

D. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengharapkan ada suatu lembaga keuangan yang bebas dari riba. Dan harapan itu ternyata terwujud dengan lahirnya bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada syariat Islam sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/1992 (tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil). Dalam hal ini lembaga keuangan yang dimaksud adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul mal dan baitut tamwil. Baitul mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infaq, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitut tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk

pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, BMT menggabungkan dua kegiatan yang berbeda sifatnya -laba dan nirlaba- dalam satu lembaga. (Hertanto Widodo, 1999:81).

Kebutuhan umat Islam akan adanya Bank berdasarkan prinsip syariah dapat dilihat dari dua kepentingan, yaitu: pertama, kepentingan ibadah yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Kedua, kepentingan muamalah yaitu melaksanakan kegiatan usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat antara lain : (a) Potensi dana umat Islam, (b) Peran serta umat Islam dalam pengerahan dana masyarakat, (c) Peluang kegiatan usaha.

Pada saat ini banyak masyarakat Indonesia yang tidak bisa lepas dari berhubungan dengan bank, namun tidak semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan kredit, seperti masyarakat yang berada di lapisan bawah. Mereka sangat sulit untuk mendapatkan kredit.

Menurut Gunawan Sumodiningrat (1998:98), selama ini masyarakat lapisan bawah sulit mendapatkan kredit, penyebabnya adalah karena masyarakat lapisan bawah dipandang tidak memenuhi kualifikasi perbankan. Sementara orientasi keuangan modern seperti bank dengan ketat mengutamakan syarat bankable, secara umum bank mensyaratkan lima kriteria yang dikenal dengan 5 C antara lain: *Character, Colateral, Capacity of Repay, Capital and Condition Economic*. Kriteria inilah yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan (pemberi kredit) dengan masyarakat (penerima kredit) semakin jauh, mengingat:

- a. Persyaratan lembaga keuangan tidak dapat dipenuhi oleh sebagian besar masyarakat khususnya termasuk persyaratan formal jaminan.
- b. Pelayanan dengan melepas uang/rentenir lebih mudah meskipun dengan bunga (cost) yang tinggi yang cenderung menjerat dan memberatkan.

BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera berusaha untuk mementingkan kesejahteraan anggota masyarakat yang terlantar dan cacat. Dalam kegiatan ini BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera memainkan peranan penting terutama dalam hal membangkitkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat, menyadarkan akan kebutuhannya dan mengarahkan usaha-usaha pencegahan dan perbaikan masalah yang tepat. Agar lembaga tersebut mampu memperlakukan peran dan fungsinya sebagaimana yang diharapkan, maka pengelola/pengurus harus memiliki kemauan dan dedikasi yang tinggi untuk menanggulangi masalah kesejahteraan sosial, juga harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang luas termasuk dalam usaha mencari, menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera (BMS) Bekasi dengan empirik lembaga keuangan BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera memiliki program dampingan anak jalanan khususnya BMT Al Inayah Unit III yang berperan mengelola pengembalian dana, mengakumulasi dana swadaya dan jasa yang diperoleh. Program ini sudah dapat dirasakan oleh masyarakat setempat sehingga mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri diantaranya dari kedutaan New Zealand, Mercy Corps International (MCI) yaitu sebuah lembaga swadaya yang

berpusat di Amerika dengan memberikan bantuan berupa dana sebagai modal dan bantuan pangan. Bantuan dana sebagai modal dikelola melalui BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera sehingga modal terus bergulir dan berkembang.

Dalam menjalankan program tersebut pihak BMT Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera berpegang pada Al-Quran Surat Al Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan”

(Soenarjo, 1971:156)

Ayat tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya tolong menolong itu merupakan perbuatan yang terpuji. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa berhubungan dengan orang lain. Memberikan bantuan pinjaman modal kepada para anak jalanan merupakan perbuatan yang dibenarkan oleh syara selama digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tetapi bila dalam hal itu terdapat madharat yang lebih besar dari pada manfaatnya, misalnya terdapat praktek riba atau hal lain yang bertentangan dengan syariat Islam maka sepatutnya tidak dijalankan. Sebagaimana kaidah fihiyyah menyatakan :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ
الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

“Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.” (Abdul Mudjib, 1992:39)

BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera memberikan layanan permodalan sebagai salah satu faktor pendukung kegiatan ekonomi yang hampir selalu muncul dari keluarga yang berpendapatan rendah, sedangkan peluang bagi masyarakat kecil dalam mengakses sangat terbatas. Banyak orang yang susah mencari kerja dan tidak sedikit juga orang sudah memiliki pekerjaan namun belum mencukupi kebutuhan hidupnya, ini terjadi karena mereka masih melakukan kegiatan produksi dalam skala kecil. Sedangkan faktor untuk melakukan produksi adalah modal.

Oleh karena itu BMT Al Inayah sepakat untuk melaksanakan program pendampingan anak jalanan yang saat ini kurang mendapat perhatian dari berbagai pihak. Program tersebut perlu dilaksanakan dengan memperkuat lembaga-lembaga pendukung yang benar-benar dimiliki, dikendalikan dan dijangkau oleh potensi pembangunan. Salah satu diantaranya adalah dengan merancang satu model lembaga kegiatan ekonomi kerakyatan yang melembaga menjadi milik masyarakat. Lembaga yang dimaksud adalah BMT.

BMT Al Inayah Yayasan BMS menghimpun dana dari pihak ketiga seperti simpanan, tabungan dan layanan penyaluran dana untuk usaha-usaha produktif. Dalam menjalankan fungsi sosialnya bukan berarti meninggalkan nilai-nilai komersial, dan dalam mengembangkan fungsi komersialnya bukan berarti meninggalkan nilai-nilai sosial, tetapi keduanya berjalan bersama-sama.

Orang masih sering keliru dengan menganggap Bank Islam adalah Bank derma yang tidak mencari keuntungan. Karena kesalahfahaman ini serta merta Bank Islam dianggap sebagai lembaga yang tidak produktif yang tidak mendorong etos kerja yang profesional. Untuk itu perlu ditegaskan bahwa bank islam bukan Bank derma atau charity Bank tetapi Bank komersial biasa yang mencari keuntungan dari pemakai dana dan jasa secara wajar dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam dari lima basis pendapatan. Pendapatan ini dari hari kehari dihitung untuk kemudian dibagihasilkan dengan penyimpanan dana. Pendapatan Bank Islam yang dibagihasilkan ini tidak berbentuk deviden tetapi berbentuk tunai yang diperhitungkan ke dalam rekening penyimpanan dana setiap bulan bahkan kalau dikehendaki dapat dihitung setiap hari (Diktat Karnaen A. Perwataatmaja, tth:7).

Dengan demikian kehadiran BMT akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain adalah :

- a) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha.
- b) Meningkatkan kesempatan kerja.
- c) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak (Karnaen A. Perwataatmaja dan Muh. Syafei, 1992 : 85).

Dengan hadirnya BMT diharapkan mampu menjadi salah satu gerakan ekonomi umat yang berusaha membebaskan masyarakat dari lilitan bunga dan memperbaiki kondisi sosial ekonominya, mengingat kekuatan ekonomi merupakan salah satu pilar kekuatan umat.

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan ini, ada beberapa langkah penelitian yang ditempuh, sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode deskriptif melalui studi kasus. Menurut Hasan Bisri (1995 : 57), metode penelitian studi kasus biasanya dibidang antropologi dan sosiologi mikro untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi.

2. Jenis Data

Jenis data yang menjadi objek pembahasan dalam penelitian ini adalah peranan BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera dalam menanggulangi anak-anak.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini pada dasarnya meliputi dua jenis, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu dengan cara mencari data-data dari lapangan yang diperoleh melalui pimpinan BMT Al Inayah Yayasan Bina Masyarakat Sejahtera, anak-anak jalanan serta informasi lain yang dapat membantu penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, yaitu melalui buku-buku, surat kabar, artikel atau lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, yaitu dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan data mengenai motif-motif suatu masalah atau kasus yang melatarbelakangi terjadinya suatu perubahan tertentu dari suatu objek studi yang diamati.

- b. Observasi, yaitu dengan tujuan langsung ke tempat yang akan diteliti.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, mengkaji serta menganalisa literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif. Metode ini memudahkan untuk mengungkap dan memecahkan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menggambarkan dan memaparkan apa adanya. Adapun penelitian ini dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik kesimpulan sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan.

